

BAB IV
ANALISA ALASAN-ALASAN PEMULIHAN HUBUNGAN
BILATERAL TURKI DAN ISRAEL DI ERA PRESIDEN ERDOGAN TAHUN 2016

Turki dan Israel mengalami masa-masa buruk dalam hubungan bilateral diantara keduanya, yakni antara tahun 2010 hingga 2015. Namun pada akhir tahun 2016, Turki dan Israel sepakat untuk memulihkan hubungan bilateral kedua negara. Melalui penjajakan dan negosiasi akhirnya Erdogan menyepakati untuk memulihkan hubungan bilateral Turki dan Israel, keputusan untuk memulihkan hubungan tersebut tentu saja melalui mekanisme kalkulasi untung rugi oleh pemerintahan Turki di era Erdogan. Melalui kalkulasi untung rugi tersebut maka dapat dilihat bahwa Turki bisa mendapatkan keuntungan lebih besar jika memulihkan hubungan dengan Israel. Pada BAB IV ini akan dibahas mengenai alasan-alasan Turki dalam memulihkan hubungan bilateral dengan Israel pada tahun 2016.

A. Keuntungan dalam Bidang Militer

Militer merupakan salah satu faktor penting bagi sebuah negara berdaulat, terutama dalam upayanya untuk menjaga keamanan masyarakatnya. Di era modern ini kekuatan militer suatu negara tidak lagi diukur hanya dari kuantitas jumlah pasukannya, tetapi lebih diperhitungkan dalam hal kecanggihan teknologi militer yang dimiliki oleh suatu negara. Untuk mengatasi kekurangan teknologi militer yang dimilikinya, maka sebuah negara dapat melakukan kerjasama militer atau membentuk aliansi dengan negara yang memiliki teknologi militer yang lebih mutakhir.

Israel merupakan negara dengan kekuatan militer dan memiliki teknologi militer yang canggih dikawasan Timur Tengah, sehingga tidak mengherankan apabila Turki mengadakan kerjasama dengan Israel dalam bidang keamanan dan kemiliteran. Hubungan kerjasama antara Turki dan Israel di bidang keamanan dan kemiliteran telah lebih dulu diintensifkan sejak tahun 1993. Kemudian data

Institut Turki menyebutkan bahwa di bidang Pertahanan dan Keamanan, kedua negara juga memiliki perjanjian *Security and Confidentiality Pact* (Perjanjian Keamanan dan Kerahasiaan), ditandatangani pada tanggal 31 Mei 1994, dengan kesepakatan tersebut kedua negara sepakat untuk saling bertukar informasi dan dipastikan jaminan atas kerahasiaannya bagi pihak ketiga mana pun, latihan militer bersama serta produksi dan perdagangan senjata (Dhani, 2016).

Kemudian pada tahun 1996, Turki dan Israel kembali menyepakati sebuah perjanjian yaitu *Military Training Cooperation Agreement (MTCA)*, yaitu sebuah program kerjasama dalam bidang kemiliteran. Kerjasama tersebut mencakup protokol mengenai pertukaran perwira, kunjungan delegasi militer, pertukaran informasi, pelatihan militer tiga matra, serta pemberantasan terorisme dan penjagaan perbatasan (Eisenstadt M. , 1997). Pelaksanaan dari kerjasama MTCA yaitu latihan militer yang disebut *Reliant Mermaid*. Latihan tersebut bertujuan untuk melatih pasukan dalam misi penyelamatan darurat dengan prosedur *Search and Rescue*. Diadakan pertama kali pada tahun 1998, yang kemudian mulai tahun 2000 dijadikan sebagai agenda tahunan.

Turki dan Israel ditahun yang sama kembali menyepakati perjanjian di bidang industri militer yang diberi nama *Defense Industry Cooperation Agreement (DICA)*. Dalam perjanjian tersebut, Turki dan Israel sepakat untuk saling menukar teknologi militer dan persenjataan. Pelaksanaan dari DICA yaitu Israel mendapatkan beberapa proyek kemiliteran Turki, diantaranya yaitu mempebaharui pesawat F-4 Phantom milik Turki dengan nilai 650 juta Dollar AS, pengadaan *Unnamed Combat Air Vehicles (UCAV)* untuk Turki senilai 76 juta Dollar AS, pembaharuan pesawat F-5 Turki dengan nilai kontrak 75 juta Dollar AS, pembaharuan Tank M60 Turki dengan nilai kontrak 600 juta Dollar AS

(Kogan, 2006). Dua kerjasama tersebut saling menguntungkan bagi Turki maupun bagi Israel, dalam hal ini Turki mendapatkan kemudahan akses terhadap teknologi Israel dalam bidang industri pertahanan, sedangkan Israel mendapatkan akses wilayah Turki untuk melakukan latihan perang. Bahkan, Israel mendapatkan akses ke pangkalan udara militer Turki yang salah satunya adalah Konya Air Base. Dimana Konya Air Base merupakan pangkalan udara terbesar di wilayah Eropa dengan luas 38.183 km dan panjang landasan pacu utama 10.900 kaki (Global Security, 2011).

Surat Kabar Turki *Hürriyet*, menyebutkan bahwa pada tahun 2007 nilai kerjasama militer antara Turki dan Israel sudah mencapai angka 2,6 miliar Dollar AS dan 1,8 miliar Dollar AS, kerjasama tersebut antaranya berbentuk pertukaran teknologi dan perlengkapan militer. Saking dekatnya hubungan Turki dan Israel, Gregg Carlstrom seorang wartawan dari Al Jazeera bahkan mengatakan bahwa Turki adalah teman (negara) Islam paling dekat dengan Israel. Bahkan, sebelum terjadinya pembekuan hubungan, pilot-pilot Israel sudah biasa berlatih di teritori udara Turki (Dhani, 2016).

Ketika mengalami pembekuan hubungan antara Turki dan Israel pasca insiden Mavi Marmara, Turki mengalami kerugian tersendiri karena pembekuan hubungan tersebut terutama dalam bidang militer. Kerugian tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Turki kehilangan pemasok utama peresenjataan dan teknologi-teknologi militer terbaru, karena seperti yang diketahui bahwa pada tahun 1996 Turki dan Israel telah menyepakati perjanjian di bidang industri militer yang diberi nama *Defense Industry Cooperation Agreement (DICA)*,

yang pada tahun 2007 nilai kerjasama tersebut sudah mencapai angka 2,6 miliar Dollar AS dan 1,8 miliar Dollar AS, namun harus terhenti karena pembekuan hubungan bilateral pada tahun 2010.

2. Selain persenjataan dan teknologi militer, Turki juga kehilangan salah satu *partner* dalam latihan militer. Seperti yang diketahui bahwa sejak tahun 1996, Turki dan Israel telah menyetujui sebuah perjanjian yaitu *Military Training Cooperation Agreement (MTCA)*, realisasi dari kerjasama tersebut yaitu *Reliant Mermaid*. Sebuah latihan bersama yang bertujuan untuk melatih pasukan dalam misi penyelamatan darurat dengan prosedur *Search and Rescue*. Diadakan pertama kali pada tahun 1998, yang kemudian mulai tahun 2000 dijadikan sebagai agenda tahunan. Namun harus dihentikan sejak tahun 2010.
3. Turki dan Israel dikawasan Timur Tengah sebenarnya memiliki nasib yang sama, yaitu etnis yang hidup dikepungan bangsa Arab. Turki merupakan etnis yang berasal dari ras Kaukasoid yang berasal dari kawasan Asia Tengah, sedangkan Israel merupakan etnis Yahudi yang kebanyakan merupakan kelahiran Eropa. Ditambah lagi dengan sejarah kelam keduanya dimasa lalu membuat mereka harus *survive* dalam kepungan negara-negara Arab. Sehingga dengan pembekuan hubungan tersebut Turki dan Israel harus berjalan sendiri-sendiri.

Pada tahun 2011 situasi dikawasan Timur Tengah memanas, karena berkejadiannya situasi domestik di beberapa negara yang mengalami *Arab Spring*, maka apapun kemungkinan bisa terjadi terhadap Turki yang juga berada dikawasan tersebut. Apalagi dengan adanya intervensi militer dari negara-negara *superpower* seperti Amerika Serikat dan Rusia di beberapa negara di kawasan

Timur Tengah yang sedang mengalami konflik, hal tersebut menyebabkan keamanan negara-negara dikawasan Timur Tengah harus ditingkatkan.

Munculnya fenomena *Arab Spring* di kawasan Timur Tengah, terutama di negara-negara Arab yang dipimpin oleh seorang diktator dalam kurun waktu yang telah lama menimbulkan dampak bagi kawasan tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari fenomena tersebut tidak hanya dirasakan oleh dalam negeri dari negara yang bergejolak tersebut, namun dampaknya juga dirasakan oleh negara-negara disekitarnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara disekitaran negara yang sedang mengalami fenomena *Arab Spring* juga memiliki kepentingan didalamnya, salah satunya yaitu Turki di konflik Suriah.

Keterlibatan Turki dalam pusaran konflik Suriah, dengan mendukung kelompok oposisi yang ingin menggulingkan Presiden Bashar Al Ashad menyebabkan secara tidak langsung Turki harus berhadapan dengan Rusia yang mendukung pemerintahan Presiden Bashar Al Ashad (Taufik, 2016). Konflik Suriah memang menjadi ajang *proxy war* antara Amerika Serikat bersama NATO yang mendukung oposisi berhadapan dengan Rusia yang pro terhadap Presiden Bashar Al Ashad. Sehingga Turki yang merupakan anggota NATO serta teritorialnya berbatasan langsung dengan Suriah, menyebabkan Turki rawan terhadap kontak langsung dengan Rusia.

Hal yang dikhawatirkan akhirnya terjadi, pada tanggal 24 November 2015 dua pesawat tempur Turki F-16 menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-24 karena dianggap melintasi wilayah Turki tanpa izin (KOMPAS, 2015). Peristiwa tersebut menyebabkan kemarahan dari pihak Rusia, bahkan Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa:

“Peristiwa ini di luar kerangka perlawanan yang biasa terhadap terorisme. Tentu saja, tentara kami sedang melancarkan perang heroik melawan teror, dengan mengorbankan nyawa mereka. Tetapi jatuhnya korban hari ini karena tikaman dari belakang oleh pendukung teroris. Tidak ada cara lain untuk menggambarkan apa yang terjadi hari ini” (Armandhanu, 2015).

Namun disisi lain Presiden Erdogan menolak untuk disalahkan dan menolak untuk meminta maaf kepada pihak Rusia atas insiden tersebut. Presiden Erdogan menyatakan bahwa :

"Alasan penembakan tersebut sederhana, demi mempertahankan keamanan dan hak saudara kami di Suriah. Kami hanya ingin mempertahankan keamanan dan hak-hak saudara kami. Kami akan melanjutkan misi kemanusiaan di wilayah perbatasan Suriah" (TEMPO, 2015).

Turki juga mengirimkan surat yang disampaikan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menyatakan jet perang Rusia itu ditembak jatuh di wilayah udaranya. Jet tersebut telah memasuki wilayah Turki sepanjang 1 mil selama lebih dari 17 detik, meskipun sudah diperingatkan sebanyak sepuluh kali agar mengubah arah penerbangannya.

Hal tersebut menyebabkan ketegangan hubungan antara Turki dan Rusia, puncaknya adalah ketika Rusia memutuskan untuk mengusir Duta Besar Turki untuk Rusia dan warga negara Turki yang ada di Rusia. Ketegangan hubungan ini dapat mengancam keamanan nasional Turki, karena militer Rusia yang sedang beroperasi di Suriah bisa saja sewaktu-waktu melakukan penyerangan terhadap wilayah Turki. Ditambah lagi dengan kekuatan militer Rusia yang berada diatas Turki, menyebabkan Turki harus siap siaga untuk menghadapi kemungkinan terburuk dari ketegangannya dengan Rusia.

Salah satu langkah yang diambil oleh Presiden Erdogan untuk kesiapan Turki adalah dengan mencari aliansi militer, pilihan rasional yang diambil oleh Presiden Erdogan ialah dengan memulihkan hubungan bilateral dengan Israel. Di

kawasan Timur Tengah kekuatan militer Israel merupakan salah satu yang terkuat, ditambah lagi dengan senjata nuklir yang mereka miliki maka posisi Israel sangat disegani. Selain itu, Israel juga tidak melibatkan diri dalam konflik Suriah menjadikannya sebagai aliansi militer yang ideal bagi Turki.

Dari data yang dikeluarkan oleh *Business Insider* tahun 2014 Israel menempati posisi ke-2 dengan militer terkuat di kawasan Timur Tengah persis dibawah Turki yang menempati urutan ke-1 (Bender & Gould, 2014). Namun, hal yang membedakan yakni kekuatan militer Israel tersebut juga disokong dengan kekuatan senjata pemusnah masal (nuklir) yang dimiliki oleh Israel. Menurut data tersebut Israel memiliki senjata nuklir sebanyak 80-200 dan Israel merupakan satu-satunya negara di kawasan Timur Tengah yang memiliki senjata nuklir, berikut tabel perbandingan kekuatan militer negara-negara di kawasan Timur Tengah yang dikeluarkan oleh *Business Insider* :

Tabel 2.1 Kekuatan Militer Negara-Negara Timur Tengah Tahun 2014



Sumber : Business Insider

Dengan kekuatan dan kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh militer Israel, hal tersebut akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Turki ketika memutuskan untuk memulihkan hubungan bilateral dengan Israel. Sehingga aliansi militer Turki dan Israel akan sangat menguntungkan bagi kedua negara. Hal tersebut tegaskan oleh Presiden Erdogan dalam naskah pidato tertulis disurat kabar Turki Kantor Berita AFP, seperti yang dilansir dari merdeka.com:

“Israel membutuhkan negara seperti Turki di kawasan, dan kami pun harus mengakui bahwa Bangsa Turki membutuhkan Israel. Inilah kenyataannya. Jika bisa dicapai langkah yang saling menguntungkan, maka normalisasi bilateral akan mengikuti secara alamiah” (Mohamad, 2016).

Sehingga dari fakta yang ada, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan Turki terhadap persenjataan dan teknologi militer Israel, aliansi militer dengan Israel, serta ketegangan antara Turki dan Rusia menjadi faktor pendorong dari terjadinya pemulihan hubungan bilateral Turki dan Israel. Keuntungan dari segi militer ini tentu saja menjadi pertimbangan rasional bagi Presiden Erdogan dalam membuat kebijakan untuk memulihkan hubungan dengan Israel, karena sebagai aktor rasional kalkulasi untung rugi merupakan suatu hal yang mutlak untuk mencapai kepentingan nasional negaranya.

B. Keuntungan dalam Bidang Politik

Uni Eropa sendiri merupakan sebuah organisasi internasional antar negara-negara Eropa yang berfokus pada ekonomi, politik, dan sosial. Uni Eropa dibentuk pada tahun 1958, namun baru diresmikan pada tahun 1992 di Maastricht, Belanda. Hingga saat ini Uni Eropa telah memiliki anggota sebanyak 28 negara (European Union, 2015). Uni Eropa juga dikenal sebagai organisasi regional yang paling berhasil dalam mengintegrasikan negara-negara anggotanya, contohnya seperti penyatuan mata uang menjadi Euro yang berlaku diseluruh negara anggota Uni Eropa, selain itu juga diberlakukannya visa Schengen diseluruh wilayah negara anggota Uni Eropa sehingga lebih memudahkan dalam berpindah tempat dari satu negara ke negara lainnya. Selain itu, masih ada lagi keuntungan yang didapat oleh negara anggota misalnya dalam bidang perdagangan seperti bebas biaya ekspor ke sesama negara anggota.

Turki memendam hasrat yang besar untuk bergabung ke dalam organisasi negara-negara Eropa yakni Uni Eropa, iming-iming keuntungan dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan juga keamanan menyebabkan banyak negara Eropa yang ingin menjadi anggota Eropa. Turki sendiri telah mendaftarkan keanggotaan di Uni Eropa dari tahun 1987 namun hingga saat ini hal tersebut belum terealisasikan (Alfian, 2015, hal. 140). Terdapat banyak kendala yang harus dihadapi Turki dalam upayanya ini, hal tersebut diantaranya yaitu konflik Turki dan Yunani di Siprus dan tuduhan genosida oleh Turki pada masa Perang Dunia I di Armenia (Taghian, 2012, hal. 393).

Meskipun demikian, hal tersebut tidak membuat Turki surut hasratnya untuk menjadi anggota penuh di Uni Eropa. Keanggotaan Turki di Uni Eropa akan membantu Presiden Erdogan dalam merealisasikan cita-cita besar *neo-ottomanism*, yakni ingin mengembalikan kejayaan Turki seperti dimasa kekhalifahan Turki Utsmani meskipun dalam bentuk lain. Dengan menjadi anggota Uni Eropa, maka akan mempermudah Presiden Erdogan untuk menyuarakan perjuangan terhadap Islam yang selama ini mendapat stigma negatif di Eropa.

Keanggotaan Turki di Uni Eropa juga dapat menjadi jalan bagi Presiden Erdogan untuk memajukan perekonomian Turki, karena dengan segala kemudahan yang ditawarkan oleh Uni Eropa bagi negara-negara anggotanya akan berdampak pada kemajuan ekonomi di negara-negara anggotanya. Hal tersebutlah yang menyebabkan Turki tidak kehilangan hasrat untuk menjadi anggota Uni Eropa meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi.

Pada 3 Oktober 2005, Turki dan Uni Eropa mencapai kesepakatan dan memulai pembicaraan mengenai penerimaan anggota baru Uni Eropa. Pertemuan ini berlangsung di Luxembourg dan dihadiri oleh pimpinan dari 25 negara anggota Uni Eropa dan Menteri Luar Negeri Turki Abdullah Gul (KOMPAS, 2005). Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah resolusi tak terbatas yang mensyaratkan Turki untuk menandatangani *Adoption Protocol* yang memperluas keberadaan *Association Agreement* dengan Uni Eropa terhadap seluruh negara anggota Uni Eropa (Sumantri, 2012, hal. 98). Tahap pertama sebagai tindak lanjut dari hasil perundingan 3 Oktober 2005 yakni segera dimulainya proses *screening* terhadap Turki. Kemudian pertemuan selanjutnya membahas terkait *screening* tersebut selesai pada Oktober 2006. Berdasarkan hasil *screening* itulah kemudian Komisi Eropa mempersiapkan laporan pemeriksaan (*screening reports*) untuk tiap bab negosiasi (Delegation of the European Union to Turkey, 2006).

Dalam kebijakan perluasan keanggotaan Uni Eropa dengan negara-negara yang saat ini mengajukan permohonan ke Uni Eropa. Ada *conditions for membership* yang ketat untuk memastikan bahwa negara calon anggota nantinya mampu memenuhi kewajiban sebagai negara anggota Uni Eropa. Termasuk untuk memenuhi semua standar dan peraturan di dalam Uni Eropa. Hal itu untuk tujuan proses akses negosiasi yang terdiri dari 130.000 halaman yang dikelompokkan dalam 35 bidang kebijakan yang berbeda.

Hingga tahun 2010, Turki telah menyelesaikan 16 bab negosiasi dari total 35 bab negosiasi. Satu bab dari 16 bab negosiasi ditutup sementara waktu (European Commission, 2015). Sikap Uni Eropa yang kerap menangguk beberapa bab dari persyaratan negosiasi dengan Turki dan keputusan beberapa negara anggota Uni Eropa khususnya oposisi seperti Prancis dan Jerman yang

menutup tawaran untuk keanggotaan Turki (Sumantri, 2012, hal. 123). Hal itu senada dengan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron dalam kunjungannya ke Turki pada 2010 yang menjelaskan bahwa Turki dianggap tidak mungkin bergabung dalam sepuluh tahun ke depan, karena adanya sebagian kelompok-kelompok mengoposisikan diri contohnya seperti Prancis, Jerman, dan Italia.

Kemudian Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi menegaskan bahwa oposisi yang ditunjukkan oleh beberapa negara-negara anggota Uni Eropa, di mana negara-negara tersebut merupakan negara-negara penting di Uni Eropa. (Euro News, 2008). Sikap oposisi ataupun penolakan dari Perancis, Jerman, dan Italia terhadap upaya Turki dalam memenuhi syarat sebagai anggota Uni Eropa tidak lepas dari pembekuan hubungan Turki terhadap Israel tahun 2010, karena Perancis, Jerman, dan Italia merupakan mitra dari Israel.

Pembekuan hubungan yang dilakukan oleh Turki terhadap Israel pada tahun 2010, menjadi penghambat untuk diterimanya Turki menjadi anggota tetap Uni Eropa, karena ada dua hal yang akan menjadi pertimbangan Uni Eropa terkait kasus ini, yaitu, *pertama*, adanya hubungan kurang baik dengan negara tetangga atau sekitar kawasan dalam hal ini Israel. Berdasarkan prinsip Kantian seharusnya negara calon anggota Uni Eropa harus memiliki hubungan baik, hubungan baik tersebut harus mencakup internal maupun dengan eksternal serta komitmen atas multilateralisme, dalam hal ini menurut Uni Eropa Turki dinilai belum memenuhinya (LaGro & Jorgense, 2007, hal. 68).

Kedua, Israel adalah mitra baik dari negara-negara anggota Uni Eropa. Desember 2015 lalu, Israel telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan

Yunani, Italia, dan Siprus atas pembentukan “segitiga energi”, yakni sebuah pipa gas bawah laut bersama sepanjang 2.100 km, untuk mengirimkan gas alam dari Israel menuju ke jantung Eropa. Bagi Italia, Yunani, dan Siprus sebagai tiga negara yang mengalami kelesuan ekonomi tentu saja penemuan gas alam Israel dan kemitraan berikutnya dengan Israel itu menjanjikan untuk memperingan situasi ekonomi mereka (Rudick, 2016).

Uni Eropa melihat Israel sebagai arena untuk menjadi kekuatan dunia dalam diplomasi yang lebih relevan, sedangkan Israel melihat Uni Eropa sebagai pasar yang dekat dan besar untuk produk negaranya. Pada tahun-tahun belakangan ini, Uni Eropa telah menyaksikan bagaimana Israel bukan hanya sebagai raksasa ekonomi baru karena terdorong oleh inovasinya, tetapi juga merupakan penghasil energi yang tidak terpisahkan dengan jalur energi Eropa. Sehingga Israel menjadi negara yang sangat penting bagi Uni Eropa. Sehingga dengan pembekuan hubungan oleh Turki terhadap Israel yang notabene merupakan mitra baik negara-negara Eropa tentu akan semakin meningkatkan stigma negatif mereka terhadap Turki.

Setelah adanya pembicaraan damai antara Turki dan Israel yang membicarakan rencana pemulihan hubungan pada tahun 2015 dan kemudian resmi memulihkan hubungan pada tahun 2016 membuat Uni Eropa mulai mengurangi stigma negatif terhadap Turki, sehingga Turki dan Uni Eropa sepakat untuk membuka pembicaraan baru terkait upaya Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa. Uni Eropa juga mulai melibatkan Turki dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami Uni Eropa, misalnya dengan dilibatkannya Turki dalam menangani masalah pengungsi dari Suriah, negosiasi Turki dan Uni Eropa terus bergerak maju dan Presiden Turki diundang untuk KTT Uni Eropa.

Akhirnya, Turki memberikan tuntutanannya yang paling penting, yakni pengajuan bebas visa perjalanan ke Eropa, secepatnya pada awal Oktober 2016 (Wesel, 2016). Berikut merupakan butir-butir kesepakatan antara Turki dan Uni Eropa :

- 1) Semua migran tak berdokumen resmi yang menyeberang dari Turki ke Yunani mulai 20 Maret 2016 akan dikirim kembali ke Turki. Setiap migran yang datang akan ditinjau secara menyeluruh oleh aparat Yunani.
- 2) Untuk setiap migran asal Suriah yang dikembalikan ke Turki, migran Suriah yang telah berada di Turki akan dikirim ke Uni Eropa. Prioritas akan diberikan bagi mereka yang belum mencoba masuk Uni Eropa secara ilegal dan jumlahnya dibatasi hingga 72.000 orang.
- 3) Warga Turki akan diberikan visa Schengen yang berlaku di semua negara anggota Uni Eropa mulai Juni 2016.
- 4) Uni Eropa akan mempercepat dana bantuan sebesar 3 Milliar Euro (Rp44,2 Triliun) ke Turki untuk menolong para migran.
- 5) Baik Uni Eropa maupun Turki sepakat menyegarkan kembali permintaan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa. Perundingan akan dimulai pada Juli 2016 (BBC News, 2016).

C. Keuntungan dalam Bidang Ekonomi

Turki dan Israel telah memiliki kerjasama dibidang ekonomi sejak tahun 1996, pada kesempatan tersebut Turki dan Israel menandatangani perjanjian kebebasan ekonomi bilateral. Kerjasama ini juga merupakan kelanjutan dari Pakta Periferal yang ditandatangani pada tahun 1958, Pakta Periferal ini berisi antara lain yaitu kedua negara sepakat untuk saling bertukar informasi intelijen dan

kampanye kehumasan ke dalam komunitas dan rakyat masing-masing (Santosa, 2017). Kemudian pada tahun 1997, Turki dan Israel kembali membuat kerjasama yang mempermudah perdagangan antar kedua negara, yaitu perjanjian pencegahan pajak berganda. Hubungan ini terus berlanjut dan kemudian berkembang pada kerjasama bidang investasi pada tahun 1998.

Pada Mei 2004, Menteri Pembangunan Israel Yusuf Paritski mengunjungi Turki. Dalam kunjungan tersebut berhasil ditandatangani sebuah kesepakatan kerjasama antara kedua negara bernilai 800 juta Dollar AS, dalam perjanjian tersebut Turki berkomitmen untuk membangun tiga pusat pembangkit listrik baru di Israel yang bertujuan untuk meningkatkan perindustrian di Israel. Selain itu, kedua negara juga menandatangani sebuah kesepakatan bahwa Turki akan mengekspor 50 juta kubik air Turki setiap tahunnya ke Israel selama 20 tahun kedepan (Taghian, 2012, hal. 455). Selain dari perdagangan, kerjasama antara Turki dan Israel yang saling menguntungkan adalah dalam pariwisata. Sebelum terjadinya pembekuan hubungan antara Turki dan Israel, berdasarkan Badan Urusan Pariwisata Israel pada periode 2008-2009, tercatat bahwa warga Israel yang pergi berkunjung ke Turki mencapai angka 560.000 orang (Dhani, 2016).

Namun akibat dari pembekuan hubungan dari Turki terhadap Israel berdampak pada penurunan kerjasama ekonomi. Penurunan kerjasama ekonomi antara kedua negara terbukti dari data statistik yang dirilis oleh TurkStat, yakni terjadi pada sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata. Di sektor perdagangan misalnya, meskipun pasca insiden Mavi Marmara 2010 angka perdagangan kedua negara tidak terdampak secara langsung, namun volume perdagangan luar negeri Turki dan Israel sempat mengalami penurunan pada tahun 2012. Hal ini dikarenakan sikap kritis Turki terhadap Israel terus berlanjut sehingga

menyebabkan eskalasi tensi hubungan kedua negara. Akibatnya, volume perdagangan kedua negara menurun hingga 400 juta dolar AS dalam kurun satu tahun, yakni dari 4,44 milyar dolar AS pada tahun 2011 menjadi 4,03 milyar dolar AS pada tahun 2012, yang mana penurunan angka ini mayoritas terjadi di sektor industri bahan-bahan kimia (Turkish Statistic Institute, 2017).

Di sektor investasi, nilai investasi Israel di Turki menurun drastis dari 997 juta dolar AS pada tahun 2010 menjadi hanya sebesar 427 juta dolar AS pada tahun 2011. Penurunan investasi Israel tersebut antara lain terjadi di sektor pertambangan minyak sebesar 13% dan sektor perbankan sebesar 11% (Bryant & Peker, 2011). Menashe Carmon, ketua *Turkish-Israeli Business Council*, mengatakan bahwa krisis hubungan diplomatik Turki dan Israel menyebabkan para investor Israel berpikir ulang atau bahkan menunda keputusan untuk berinvestasi dan mendirikan usaha bersama jangka panjang di Turki (Setrakian, 2011).

Selain itu, investasi Turki di Israel juga terdampak karena masalah ini, misalnya, *Zorlu Group* yang mengurangi aktivitas dan operasi dalam proyek gas alam di Israel karena tekanan dan sensitivitas masyarakat sipil, kemudian *Yilmazlar Construction Group*, perusahaan Turki yang bergerak dalam bidang konstruksi di Israel sejak tahun 1993 dan telah mempekerjakan 700 tenaga kerja Israel, mengklaim bahwa aset-aset perusahaan sebesar jutaan dolar AS dibekukan oleh pengadilan Israel sebagai dampak dari tensi politik kedua negara (Cagaptay & Evans, 2012).

Di sektor pariwisata, industri pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak karena pembekuan hubungan ini. Setelah insiden Mavi Marmara tahun

2010, Kementerian Luar Negeri Israel mengumumkan *travel warning* yang mengakibatkan jumlah wisatawan Israel yang berkunjung ke Turki semakin berkurang, yakni dari 110.322 wisatawan pada tahun 2010 menjadi 79.420 wisatawan pada tahun 2011. Kunjungan wisatawan Israel ke Turki yang berkurang pun berdampak pada penurunan pendapatan wisata yang diperoleh Turki dari wisatawan Israel, yakni dari 120 juta dolar AS pada tahun 2009 menjadi hanya 61 juta dolar AS pada tahun 2011 (Turkish Statistic Institute, 2017).

Konflik antara Turki dan Israel akibat insiden Mavi Marmara yang berujung pada pembekuan hubungan, sebenarnya sangat merugikan kedua negara dalam bidang ekonomi. Karena bagaimana pun, Turki dan Israel merupakan dua negara yang saling membutuhkan di kawasan Timur Tengah. Sehingga pemulihan hubungan bilateral akan berdampak baik bagi ekonomi kedua negara, dengan adanya pemulihan hubungan kedua negara akan semakin mudah dalam menjalankan kerjasama ekonomi. Terbukti bahwa Israel merupakan mitra perdagangan yang menguntungkan bagi Turki, hal tersebut dibuktikan dari data *Turkish Statistical Institute* berikut yang menunjukkan bahwa Israel merupakan negara nomor 6 sebagai tujuan ekspor Turki.

Tabel 1.3 Data 20 Negara Terbesar Tujuan Ekspor Turki

Ülkelere göre yıllık ihracat (en çok ihracat yapılan 20 ülke)
Exports by country and year (top 20 country in exports)

(Değer: Bin ABD \$ / Value: Thousand US \$)

Sıra Rank	Ülke	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	Country
	Toplam	157 000 247	142 529 584	143 838 871	157 610 158	151 802 637	152 461 737	134 906 869	113 883 219	102 142 613	132 027 196	Total
1	Almanya	15 119 632	13 998 653	13 417 033	15 147 423	13 702 577	13 124 375	13 950 825	11 479 066	9 793 006	12 951 755	Germany
2	İngiltere	9 604 071	11 685 790	10 556 393	9 903 172	8 785 124	8 693 599	8 151 430	7 235 861	5 937 997	8 158 669	United Kingdom
3	BAE	9 184 210	5 406 993	4 681 255	4 655 710	4 965 630	8 174 607	3 706 654	3 332 885	2 896 572	7 975 400	UAE
4	Irak	9 055 124	7 636 670	8 549 967	10 887 826	11 948 905	10 822 144	8 310 130	6 036 362	5 123 406	3 916 685	Iraq
5	ABD	8 654 405	6 623 347	6 395 842	6 341 841	5 640 247	5 604 230	4 584 029	3 762 919	3 240 597	4 299 941	USA
6	İtalya	8 473 843	7 580 837	6 887 399	7 141 071	6 718 355	6 373 080	7 851 480	6 505 277	5 888 958	7 818 988	Italy
7	Fransa	6 584 481	6 022 485	5 845 032	6 464 243	6 376 704	6 198 536	6 805 821	6 054 499	6 211 415	6 617 511	France
8	İspanya	6 302 567	4 988 483	4 742 270	4 749 584	4 334 196	3 717 345	3 917 559	3 536 205	2 818 470	4 047 267	Spain
9	Hollanda	3 864 708	3 589 432	3 154 867	3 458 689	3 538 043	3 244 429	3 243 080	2 461 371	2 127 297	3 143 835	Netherlands
10	İsrail	3 407 514	2 955 545	2 698 139	2 950 902	2 649 663	2 329 531	2 391 148	2 080 148	1 522 436	1 935 235	Israel
11	İran	3 259 338	4 966 176	3 663 760	3 886 190	4 192 511	9 921 602	3 589 635	3 044 177	2 024 546	2 029 760	Iran
12	Belçika	3 151 444	2 548 240	2 557 805	2 939 108	2 698 804	2 359 575	2 451 030	1 960 441	1 795 682	2 122 434	Belgium
13	Romanya	3 139 247	2 671 249	2 815 506	3 008 011	2 616 313	2 495 427	2 878 760	2 599 380	2 201 936	3 987 476	Romania
14	Polonya	3 070 912	2 650 505	2 329 176	2 401 689	2 058 857	1 853 700	1 758 252	1 504 280	1 322 218	1 586 772	Poland
15	Çin	2 936 267	2 328 044	2 414 790	2 861 052	3 600 865	2 833 255	2 466 316	2 269 175	1 600 296	1 437 204	China
16	Bulgaristan	2 803 394	2 383 500	1 675 928	2 040 157	1 971 247	1 684 989	1 622 777	1 497 384	1 385 544	2 151 534	Bulgaria
17	Rusya Federasyonu	2 734 587	1 732 954	3 588 331	5 943 014	6 964 209	6 680 777	5 992 633	4 628 153	3 189 607	6 483 004	Russia
18	Suudi Arabistan	2 734 481	3 172 081	3 472 514	3 047 134	3 191 482	3 676 612	2 763 476	2 217 646	1 768 216	2 201 875	Saudi Arabia

Sumber :Turkish Statistical Institute (http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046)

Pemulihan hubungan ini dapat merubah persepsi dunia internasional dalam bidang ekonomi, kesepakatan antara Turki dan Israel dapat membantu menghilangkan pesimisme investor dan memicu keberpihakan investor pada Turki, dimana kebijakan luar negeri mencerminkan realitas ekonomi Turki. Setelah pemulihan hubungan, kedua negara langsung melakukan peninjauan kerjasama di bidang energi. Peninjauan itu salah satunya dilakukan dengan kunjungan kerja Menteri Infrastruktur, Energi, dan Sumber Daya Air Israel, Yuval Steinitz ke Turki pada 13 Oktober 2016 untuk bertemu dengan Menteri Bidang Energi Turki. Selain pertemuan itu, kedua menteri juga bertemu di sela-sela penyelenggaraan Kongres Energi Dunia ke-23 di Istanbul (KOMPAS, 2016).

Dari data dan fakta tersebut dapat disimpulkan, bahwa dengan kondisi perpolitikan yang tidak menentu karena pembekuan hubungan bilateral oleh Turki terhadap Israel karena insiden Mavi Marmara mengganggu kondusifitas kerjasama ekonomi kedua negara. Dengan adanya pemulihan hubungan tentu saja dalam hubungan ekonomi tidak akan ada hambatan dan lebih kondusif, sehingga secara ekonomi pemulihan hubungan ini akan menguntungkan bagi kedua negara.

D. Cara Presiden Meminimalisir Kerugian

Pemulihan hubungan bilateral antara Turki dan Israel tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi Turki, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yang harus ditanggung oleh Presiden Erdogan. Konsekuensi yang dihasilkan dari

pemulihan hubungan ini jika tidak dikelola dengan baik oleh Presiden Erdogan maka akan menghasilkan kerugian bagi Turki, kerugian tersebut bisa berasal dari sektor militer, ekonomi, maupun politik. Sehingga Presiden Erdogan harus menemukan formula yang tepat untuk menetralsir kemungkinan kerugian yang akan menimpa Turki yang merupakan konsekuensi pemulihan hubungan dengan Israel.

Kerugian-kerugian yang dapat timbul akibat pemulihan hubungan ini, yaitu dari segi politik Turki dapat kehilangan kepercayaan dari kalangan negara-negara Islam terutama anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), karena dianggap bekerjasama dengan negara yang menjadi musuh bersama umat Islam yang menjajah umat Islam di Palestina. Dari segi ekonomi, negara-negara Islam yang melakukan investasi di Turki ataupun memiliki kerjasama perdagangan dengan Turki dapat saja membatalkan kerjasama tersebut secara sepihak karena kecewa terhadap keputusan Presiden Erdogan Tersebut.

Kemudian dari segi militer, Turki dapat dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara Jazirah Arab karena kembali menjadi aliansi militer Israel yang mana seperti yang kita ketahui bahwa Israel sudah dua kali berperang dengan negara-negara Arab sejak deklarasi kemerdekaannya pada tahun 1946. Ketika momen seperti inilah seorang aktor rasional diuji, karena pada dasarnya keputusan rasional tidak hanya dirancang untuk menghitung kalkulasi untung rugi yang dapat diperoleh, tetapi juga harus memperhitungkan cara untuk meminimalisir kerugian yang akan diterima sebagai konsekuensi dari sebuah keputusan yang diambil.

Presiden Erdogan tentu saja telah memperhitungkan hal tersebut dengan matang, sehingga Turki mengajukan dua syarat kepada Israel sebelum akhirnya memutuskan untuk memulihkan hubungan dengan Israel. Syarat-syarat tersebut yaitu, *pertama*, Israel harus membuka blokade terhadap akses darat, laut, dan udara terhadap Penduduk Palestina di Jalur Gaza. *Kedua*, Israel harus meminta maaf atas insiden penyerangan kapal Mavi Marmara pada tahun 2010 serta membayar kompensasi sebesar USD 20 juta untuk korban luka dan keluarga korban yang tewas.

Melalui kedua syarat tersebut, secara tersirat Presiden Erdogan ingin menunjukkan kepada negara-negara Islam bahwa Turki lah yang memegang kontrol dari pemulihan hubungan ini. Turki ingin menunjukkan bahwa pemulihan hubungan ini tidak semata-mata untuk kepentingan nasional Turki saja, tetapi juga untuk kepentingan umat Islam. Permintaan maaf dan pembayaran kompensasi dari Israel atas insiden Mavi Marmara membuat dunia melihat bahwa Israel secara tidak langsung mengakui bahwa merekalah yang menjadi dalang atas penyerangan kapal sipil yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina tersebut.

Kemudian dengan dibukanya blokade terhadap Gaza oleh pemerintah Israel membuat negara-negara Islam lebih mudah menyalurkan bantuan kemanusiaan terhadap rakyat Gaza, hal tersebut juga memberikan rasa aman bagi relawan-relawan dari negara-negara Islam di dunia yang ingin membantu rakyat Palestina. Sehingga upaya Presiden Erdogan secara tidak langsung dapat menetralkan kemungkinan kerugian yang dapat menimpa Turki yang diakibatkan oleh pemulihan hubungan bilateral Turki dan Israel oleh Presiden Erdogan.

